

**GRAND STRATEGI  
DEWAN KELAPA INDONESIA  
(Penyunting: Dr. Ir. Haradi Basri)**

## **I. LATAR BELAKANG**

Kelapa merupakan komoditi penting bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Produk tanaman kelapa selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga sebagai sumber devisa negara melalui ekspor. Selain itu komoditi ini dapat menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit yaitu sekitar 6,9 juta KK, serta telah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah pengembangan. Kontribusi kelapa dalam ekspor Indonesia (tahun 2006) adalah: kopra 62.410 ton (US\$ 36,885 juta), minyak kelapa 519.974 ton (US\$ 270,667 juta) dan bungkil 238,359 ton (US\$ 15,774 juta).

Pada tahun 2007 dengan luas areal 3.859 ribu ha, dikelola oleh perkebunan rakyat (PR) seluas 3.701 ribu ha (98,22%), Perkebunan Besar Negara (PBN) seluar 6 ribu ha (0,15%) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 63 ribu ha (1,63%), dengan total produksi sebesar 3.039 ribu ton setara kopra, yang berasal dari PR sebesar 2.966 ribu ton (76,86%), PBN sebesar 5,2 ribu ton (0,13%) dan PBS sebesar 67,3 ribu ton (1,74%). Lokasi perkebunan kelapa terbesar di seluruh kepulauan nusantara yang meliputi Sumatera (33,63%), Jawa (22,75%), Sulawesi (19,40%), Bali, NTB dan NTT (7,70%), Maluku dan Papua (8,89%) serta Kalimantan (7,62%).

Areal tanaman kelapa di Indonesia merupakan areal terluas di dunia (tahun 2004) yaitu mencapai 31,92%, disusul Philipina (26,12%), India (15,22%), Srilangka (3,17%) dan Thailand (2,75%). Namun demikian dari aspek produksi Indonesia hanya menduduki posisi ke dua setelah Philipina. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas kelapa Indonesia masih di bawah produktivitas kelapa Philipina.

Selama tiga decade terakhir areal tanaman kelapa berkembang dari sekitar 1,8 juta ha (tahun 1970) menjadi 3,9 juta ha (tahun 2005) atau bertambah sekitar 2,1 juta ha. Pertambahan melalui proyek pemerintah sekitar 0,4 juta ha (15,8%) dan swadaya masyarakat sekitar 1,6 juta ha (84,2%). Sejalan dengan perkembangan luas areal, produksi kelapa juga meningkat dari sekitar 1,2 juta ton (tahun 1970) menjadi sekitar 3,290 juta ton ekivalen kopra (tahun 2005) atau bertambah 1,290 juta ton.

## **II. PERMASALAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN**

### **2.1. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis kelapa di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Produktivitas tanaman kelapa rendah yaitu sekitar 1,1 ton/ha atau sekitar 50% dari potensi produksinya
- b. Kondisi tanaman sudah tua dan tidak produktif sekitar 438 ribu ha (11,58% dari total areal kelapa)
- c. Sekitar 98,225 perkebunan kelapa merupakan perkebunan rakyat dengan kepemilikan lahan terbatas, pemanfaatannya belum optimal serta penerapan teknologi yang belum utuh.
- d. Struktur industri perkelapaan saat ini belum terpadu dan hampir seluruhnya masih bersifat parsial, sehingga nilai tambahnya belum optimal.

- e. Ekspor sebagian besar masih dalam bentuk produk primer.
- f. Hasil samping dan limbah belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga belum dapat dihasilkan nilai tambah yang berarti secara ekonomi, baik di tingkat petani maupun ditingkat prosesor.
- g. Jenis produk turunan kelapa yang baru dapat dihasilkan masih terbatas dibanding negara produsen kelapa lain, seperti Philipina, telah dapat mengembangkan sebanyak lebih dari 100 jenis produk.
- h. Penanganan agribisnis perkelapaan masih tersegmentasi/sektoral, belum dan cenderung merugikan posisi petani kelapa sebagai penghasil produk primer.
- i. Pengelolaan usaha belum dilakukan secara optimal, sehingga masih banyak potensi sumberdaya belum termanfaatkan serta belum dapat memberikan jaminan pendapatan yang layak bagi petani kelapa.
- j. Persaingan dengan minyak nabati lainnya, khususnya kelapa sawit telah menekan pengembangan tanaman kelapa.
- k. Tidak tersedianya kredit murah untuk peremajaan tanaman tua dan rusak.
- l. Serangan hama dan penyakit (seperti busuk pucuk, penyakit layu) belum dapat diatasi secara menyeluruh.

## 2.2. Tantangan

Dalam usaha agribisnis perkelapaan terdapat beberapa tantangan yang meliputi:

- a. Pesatnya penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku minyak goreng di dalam negeri sehingga semakin menggeser posisi minyak kelapa. Oleh karena itu perlu upaya penganekaragaman produk kelapa dan ikutannya yang berorientasi pasar global;
- b. areal tanaman tua yang belum direhabilitasi/diremajakan cukup luas sehingga mempengaruhi/mereduksi tingkat produktivitas per hektar;
- c. Semakin tingginya tuntutan konsumen (terutama di negara maju) untuk produk-produk pertanian, termasuk produk kelapa terutama dari aspek kesehatan, yang diimplementasikan dengan penetapan standar internasional (ISO, dll);
- d. Dalam era otonomi daerah, prakarsa dan tanggungjawab pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan agribisnis perkelapaan di Indonesia merupakan tugas pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat perannya hanya sebagai fasilitator, stimulator an regulator.
- e. Kegiatan pembangunan ekonomi itu sendiri dilakukan oleh masyarakat memerlukan peranan pelaku usaha dan pemerintah daerah menjadi semakin penting dan sangat menentukan.

## 2.3. Peluang

Beberapa peluang dalam usaha agribisnis perkelapaan mencakup:

- a. Adanya pangsa pasar dunia yang relatif mapan untuk produk minyak kelapa dan kecenderungan harga minyak kelapa lebih stabil dibandingkan dengan CPO.
- b. Potensi untuk pengembangan produk (product development) cukup luas dan terbuka, sehingga akan memperluas segmen pasar.
- c. Lahan di antara pertanaman kelapa berpotensi untuk diversifikasi usaha, sehingga pengembangan cabang usaha lain dalam areal yang sama akan dapat meningkatkan produktivitas usahatani.
- d. Tersedianya teknologi tepat guna, baik pada subsistem hulu, *on-farm*, dan hilir yang dapat mendukung usaha diversifikasi produk untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan olah (*zero waste*), dan membuka peluang bagi petani untuk mendapatkan nilai tambah.
- e. Adanya dukungan industri rumah tangga, kecil dan menengah yang membutuhkan bahan baku kelapa termasuk bahan ikutannya.

- f. Tersedianya areal pengembangan seluas 15, 2 juta ha (baik lahan kering maupun lahan basah).
- g. Produk kelapa dan hasil sampingnya bersifat *biodegradable* (ramah lingkungan).

### **III. DEWAN KELAPA INDONESIA**

#### **3.1. Landasan Hukum**

Dewan Kelapa Indonesia dibentuk berdasarkan UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, pasal 19 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam rangka membangun sinergi antar pelaku agribisnis perkebunan (dalam hal ini kelapa), pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini berdasarkan kendala yang dihadapi industri kelapa serta potensi yang dimiliki diharapkan perkelapaan Indonesia menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diperlukan kebersamaan langkah dan sinergi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perkelapaan di tanah air dan berjuang serta berusaha bersama dalam Dewan Kelapa Indonesia.

#### **3.2. VISI, Misi, Tujuan, Tugas dan Fungsi**

##### **Visi**

Visi dari Dewan Kelapa adalah: *"Kemakmuran bagi pemangku kepentingan perkelapaan melalui perkebunan, industri dan tataniaga perkelapaan yang memberi arti positif bagi kemakmuran bangsa dan negara secara ekonomis, menjaga kelestarian lingkungan"*.

##### **Misi**

Dewan Kelapa Indonesia mempunyai misi:

- a. Mencerdaskan masyarakat perkelapaan sehingga siap dan mampu berkompetisi dalam persaingan global.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkelapaan melalui peningkatan produksi dan nilai tambah kelapa.
- c. Mengembangkan kebun kelapa sebagai sumber penghasilan petani kelapa dan juga dapat berfungsi untuk mencegah bencana dan kerusakan alam
- d. Mengembangkan teknologi dan industri pengolahan berbasis kelapa melalui suatu mekanisme yang adil sehingga tumbuh dan berkembangnya industri perkelapaan yang berdayaguna dan berdaya saing global
- e. Menciptakan sistem rantai pasok kelapa dan produk olahannya yang meliputi distribusi, tataniaga dan logistik sehingga berjalan dalam persaingan yang sehat baik di pasaran dalam negeri maupun ekspor
- f. Menciptakan kinerja yang sehat dan saling bersinergi antar lembaga perkelapaan yang ada maupun dengan lembaga lainnya dalam upaya memajukan pembangunan perkelapaan di Indonesia.

## **Tujuan**

Dewan Kelapa bertujuan meningkatkan kesejahteraan para petani dan pelaku perkelapaan melalui mekanisme yang adil, tumbuh dan berkembangnya industri perkelapaan serta tumbuhnya sektor jasa pendukung yang sehat.

## **Tugas**

Dewan Kelapa Indonesia bersama pemerintah bertugas menata, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan usaha perkelapaan.

## **Fungsi**

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Kelapaan Indonesia melakukan fungsi:

- a. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan perkelapaan
- b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka keterpaduan langkah baik dalam kebijakan maupun pada level operasional dalam pembangunan perkelapaan
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah serta bekerjasama dengan organisasi terkait di dalam dan di luar negeri untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif.
- d. Menyelenggarakan fasilitasi untuk pengembangan produk baru, pengembangan pasar dan promosi baik di dalam maupun luar negeri, serta pengembangan SDM.
- e. Membantu mengupayakan kemajuan dan pemberdayaan semua pelaku pembangunan perkelapaan yang meliputi Usaha tani, Industri Pengolah, Pemasaran dan jasa pendukungnya, dalam suatu sistem yang adil dan serasi.
- f. Mengupayakan peningkatkan akses terhadap informasi, teknologi, permodalan, pasar, sarana dan prasarana bagi pelaku pembangunan perkelapaan
- g. Menjalin kerjasama dengan para anggota dan organisasi lain serta pihak-pihak yang terkait baik di dalam maupun di luar negeri untuk memajukan usaha perkelapaan
- h. Melakukan fungsi lainnya yang dipandang perlu dalam upaya pembangunan perkelapaan.

## **IV. KEBIJAKAN, SASARAN, RANCANGAN PENGEMBANGAN DAN LANGKAH OPERASIONAL**

### **4.1. Kebijakan Pemerintah**

#### **4.1.1. Arah Kebijakan Jangka Panjang**

*“Mewujudkan agribisnis kelapa yang berdaya saing dan berkeadilan yang dapat memberikan tingkat kesejahteraan secara berkelanjutan bagi pelaku usahanya”.* Program jangka panjang akan ditempuh melalui beberapa tahapan implementasi program lima tahunan (jangka menengah), yang dirumuskan berdasarkan pemanfaatan potensi sumberdaya utama (existing area, SDM petani, dan lahan) yang ada didukung dengan potensi sumber daya penunjang (pendanaan, sarana pengolahan, pemasaran, infrastruktur, dll).

#### 4.1.2. Fokus Jangka Menengah (2005 - 2010)

##### 1). Peningkatan Produktivitas dan Mutu hasil Kelapa

Kebijaka ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman serta mutu hasil kelapa secara bertahap, baik yang dihasilkan oleh petani pekebun maupun perkebunan besar. Penerapan kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu kelapa ditempuh antara lain melalui:

- a. Mendorong pengembangan industri benih yang berbasis teknologi dan pasar
- b. Rehabilitasi dan peremajaan tanaman kelapa menggunakan bibit unggul
- c. Diversifikasi usaha tani
- d. memfasilitasi dan membantu mengembangkan orhanisasi petani
- e. pengembangan networking antar pelaku usaha perkelapaan
- f. Membangun fungsi kelembagaan semacam *coconut board*

##### 2) Pengembangan Industri Hilir dan Peningkatan Nilai tambah Kelapa

##### 3) Dukungan Penyediaan Pembiayaan

#### 4.1.3. Implikasi Kebijakan

Pengembangan agribisnis komoditas kelapa dilakukan melalui kegiatan pokok dan penunjang. Kegiatan pokok adalah peremajaan dan diversifikasi tanaman, penganekaragaman produk (product development) dan pemasaran serta pemberdayaan petani dan kelembagaannya. Untuk mendukung kegiatan poko tersebut diperlukan:

- 1) sertifikasi lahan petani untuk memperkuat hak kepemilikan atas tanah
- 2) Fasilitasi ke sumber pembiayaan
- 3) Dukungan sarana dan prasarana (jalan, pelabuhan, transportasi, komunikasi dan energi)
- 4) Kebijakan fiskal berupa keringanan pajak dan penghapusan pungutan yang memberatkan usaha perkelapaan
- 5) Fasilitasi terwujudnya kemitraan antar sesama stakeholders dalam kelembagaan yang sesuai
- 6) Dukungan peraturan tingkat pusat dan daerah untuk mengatur wilayah pengelolaan, penebangan, lalulintas bahan baku dan produk olahan

#### 4.2. Sasaran Pengembangan

##### 4.2.1. Sasaran umum Jangka Panjang

Dalam jangka panjang (200-2025) sasaran secara makro, komoditi kelapa merupakan sumber devisa, penyedia lapangan kerja, dan kontributor PDB yang signifikan dalam pembangunan nasional. Pada tingkat mikro, komoditi kelapa telah menjadi sumber pendapatan/penghasilan yang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usahanya.

Secara spesifik sasaran jangka panjang yang ingin dicapai adalah:

- a. indonesia sebagai negara produsen kelapa terbesar di dunia dengan tingkat kemampuan daya saing yang cukup tinggi
- b. Produktivitas tanaman telah dapat ditingkatkan menjadi 2 ton setara kopra/ha/tahun.
- c. sekitar 50% dari total areal tanaman kelapa merupakan tanaman kelapa dengan bibit unggul vareitas komposit
- d. Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Product* (GHP) secara konsisten,

- e. Jumlah dan jenis produk kelapa yang diekspor meningkat, baik produk utama, hasil samping dan hasil ikutan yang mengandung nilai tambah
- f. Pendapatan petani dari usahatani minimal 1.500 US \$/KK/tahun
- g. Harga produk di tingkat petani 80% dari harga FOB untuk setiap jenis produk yang diekspor
- h. Penerapan zero waste product/green product secara konsisten dan kontinu.
- i. Berkemangnya industri kelapa hilir
- j. Petani telah dapat dikonsolidasikan dalam kelembagaan usaha yang efektif (corporate community)
- k. Kemampuan petani dalam mengantisipasi perubahan/permintaan pasar cukup tinggi

#### 4.2.2. Sasaran Khusus Jangka Menengah

Dalam jangka menengah (2005-2010), pemerintah secara makro memproyeksikan komoditi kelapa telah siap untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi komoditi andalan dalam penerimaan devisa, penyedia lapangan kerja, dan kontributor PDB yang signifikan dalam pembangunan nasional. Pada tingkat mikro, komoditi kelapa akan semakin berkembang menjadi usaha agribisnis yang cukup prospektif melalui pengembangan usaha terpadu untuk dapat memberikan pendapatan/penghasilan yang layak bagi pelaku usahanya.

Secara khusus dalam jangka menengah yang ingin dicapai:

- a. Mempersiapkan Indonesia sebagai negara produsen kelapa terbesar di dunia dengan mengembangkan usaha agribisnis kelapa yang berdaya saing dengan proyeksi produksi (setara kopra) sekitar 4 juta ton.
- b. Produktivitas tanaman telah dapat ditingkatkan dari 1,1, menjadi 1,5 ton setara kopra/ha/tahun.
- c. sekitar 20% dari total areal tanaman kelapa merupakan tanaman kelapa yang berasal dari bibit unggul.
- d. Jumlah dan jenis produk kelapa yang diproduksi dan diekspor lebih banyan dan beragam, pemanfaatan hasil samping (batang kelapa) dan limbah (tempurung, air dan sabut) semakin berkembang.
- e. Pendapatan petani dari usahatani dapat ditingkatkan minimal 1.00 US \$/KK/tahun
- f. Harga produk di tingkat petani 75% dari harga FOB untuk setiap jenis produk yang diekspor
- g. Kebutuhan pupuk untuk perluasan dan peremajaan adalah urea sebanyak 78.650 ton, Sp.36 sebanyak 58.850 ton.
- h. Penerapan GAP dan GHP serta *zero waste produc* secara konsisten.
- i. Petani telah dikonsolidasikan dalam kelembagaan usaha yang efektif (koperasi)
- j. Kemampuan petani dalam mengantisipasi perubahan/permintaan pasar meningkat.
- k. Tersedianya sumber dana untuk membiayai peremajaan kelapa
- l. Pelaksanaan intensifikasi, peremajaan, pengembangan, diversifikasi dan pembangunan unit pengolahan.

#### 4.3. Rencana Pengembangan

##### 1. Rencana Pengembangan

Untuk memberikan hasil yang optimal dari tanaman kelapa, maka rencana pengembangan agribisnis kelapa (2006-2010) melalui kegiatan-kegiatan: intensifikasi (1.000.000 ha), peremajaan (500.000 ha), pengembangan (5000 ha),

diversifikasi (500.000 ha), unit pengolahan skala kecil/menengah (500 unit), pengolahan oleochemical kapasitas 100.000 ton/tahun (5 unit).

## 2. Pengembangan Kelapa

### 2.1. Pengembangan Kelapa Terpadu

- a. Mengembangkan tanaman kelapa rakyat yang terpadu dengan unit pengolahan yang mampu menghasilkan beraneka ragam produk kelapa (minyak goreng kelapa, sari kelapa/nata decoco, sabut kelapa dan arang tempurung) untuk meningkatkan nilai tambah produk kelapa.
- b. Meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa rakyat dengan diversifikasi tanaman atau integrasi dengan ternak melalui peran serta masyarakat.
- c. Mempercepat peremajaan kelapa rakyat dengan menggunakan teknologi anjuran.

### 2.2. Bantuan Bibit Untuk Peremajaan Kelapa

- a. Peremajaan kelapa dilakukan dengan bantuan bibit kelapa, saprodi dan tenaga kerja berasal dari pemerintah, sedangkan untuk tanaman sela diharapkan swadaya petani atau dibantu dinas yang membidangi perkebunan di propinsi dan atau kabupaten
- b. Dukungan pelatihan, baik pelatihan yang menyangkut aspek budidaya dan pengelolaan kelapa terpadu maupun pelatihan dalam peningkatan sumber daya manusia.

## 4.4. Langkah Operasional

Dalam rangka pengembangan agribisnis kelapa, pemerintah menyiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh:

1. Pemberdayaan petani
  - a. Penumbuhan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha, khususnya di sentra-sentra produksi dan pengembangan kelapa
  - b. Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam rangka memanfaatkan peluang bisnis yang ada
  - c. Studi banding baik ke sumber teknologi, petani maju serta kemungkinan studi banding ke negara produsen kelapa lainnya
2. Penataan Kelembagaan
  - a. Fasilitasi kelembagaan keuangan pedesaan, sehingga dapat terjangkau oleh petani pekebun
  - b. Fasilitasi seluruh stakeholders yang terkait dengan industri kelapa
  - c. Restrukturisasi dan pemantapan pola pengembangan
3. Pengolahan dan Pemasaran hasil
  - a. Pembangunan unit pengolahan kelapa terpadu di tingkat petani bermitra dengan investor dan pemda di daerah sentra produksi kelapa
  - b. Mendukung pengembangan industri kelapa termasuk coco-diesel sehingga produk olahan kelapa bisa mantap dipasarkan kesetiap segmen pasar dengan harga yang menguntungkan
  - c. Fasilitasi dan pemberian insentif serta promosi investasi untuk pengembangan industri hilir terpadu.